

novan umsida

by Novan Umsida

Submission date: 17-Jan-2024 01:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2272400919

File name: Model_Pengelolaan_Pendidikan_Inklusi_Sekolah_Dasar_17_01_24.docx (145.59K)

Word count: 5751

Character count: 38253



Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar

Nofan Arifianto ¹⁾, Nurdyansyah ^{*2)}

¹⁾Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

e-mail: nofanarifianto85@gmail.com

e-mail: nurdyansyah@umsida.ac.id

Abstract.

The implementation of inclusive education in elementary schools is still not fully running smoothly. most schools do not have an ideal Inclusive Education Management Model starting from input, process and output, causing schools to still not accept students with special needs. The purpose of this research is to deeply analyze the Inclusive Education Management Model in elementary schools. this research method uses a descriptive qualitative approach. the subjects in this research are principals, teachers and students. Data collection techniques using deep interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used in this research is data triangulation through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Inclusive Education Management Model plays an active role in facilitating and succeeding the implementation of Inclusive Education in Elementary Schools. The implemented Inclusive Education Management Model starts from planning, implementation, evaluation and follow-up so that it is technically easy to be adopted and implemented by other educational institutions.

Keywords - Management Model; Inclusive Education.

Abstrak. –

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar masih belum sepenuhnya berjalan lancar. sebagian besar sekolah belum memiliki Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi yang ideal mulai dari input, proses dan output sehingga menyebabkan sekolah masih belum menerima siswa berkebutuhan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi di sekolah dasar. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan deep interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi sangat berperan aktif dalam memudahkan dan menyukseskan implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi yang diimplementasikan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut sehingga secara teknis mudah untuk diadopsi dan diterapkan oleh lembaga pendidikan yang lain.

Kata Kunci – Model Pengelolaan; Pendidikan Inklusi.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.[1] Artinya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.[2] Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah mewujudkan pendidikan untuk semua masyarakat, tanpa pernah melihat golongan, suku, warna kulit dan agama.[3] Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (*basic human right*) sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk Anak berkebutuhan Khusus yang kemudian disingkat ABK dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu sama dengan peserta didik regular lainnya.[4] Sebagai mana tersurat pada UU Nomor 20 tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan juga masa depannya, tidak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus. Pada masa sekarang ini sering dijumpai anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti tuna netra,

tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak-anak berkesulitan belajar, autisme, dan lain-lain yang harus mendapat perlakuan yang sama dalam dunia pendidikan.[5]

Sistem Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[6] Syarat penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di sebuah Lembaga Pendidikan antara lain : 1) perubahan hati dan sikap, 2) reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pembelajaran, dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan, 3) redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia, 4) redefinisi peran SLB, 5) penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas/guru pendamping khusus sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan, dan 6) pembentukan, peningkatan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat. Inklusi juga akan memerlukan sistem pendidikan yang fleksibel termasuk kurikulum dan sistem ujian yang fleksibel bagi anak berkebutuhan khusus.[7]

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.[8] Pemerintah memberikan salah satu pelayanan pendidikan khusus yaitu berupa sekolah inklusif untuk pemenuhan hak Peserta didik difabel dalam memperoleh pendidikan[9]. Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.[10] Pendidikan Inklusi dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi.[11] Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan keluhan orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.[12]

Implementasi pendidikan inklusi di sekolah tidak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa kendala yang menghambat jalannya pendidikan inklusi di sekolah. Beberapa hambatan tersebut antara lain: kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus, minimnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran, belum tersedianya ruang sumber untuk pemberian layanan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus, belum adanya kurikulum plus, dan berbagai jenis ABK yang memiliki keberagaman karakteristik.[1] Sekolah membutuhkan strategi yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi supaya hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan. Pembelajaran kreatif di lingkungan sekolah tidak hanya memperhatikan pada kondisi fisik peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Namun, pembelajaran kreatif dengan mengedepankan prinsip pendidikan inklusi dapat diintegrasikan dengan ragam media pembelajaran sehingga, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua.[13]

Seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan inklusif ini berjalan dengan berbagai hambatan dan kesulitan yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dalam segi penerimaan, keterbukaan, keingintahuan praktik pendidikan inklusif dilapangan ditemukan bahwa sudah semakin berkembang dengan adanya pandangan kepala sekolah dan sebagian guru yang luas mengenai pendidikan inklusif ini dengan memperhatikan kebutuhan siswa yang beragam.[14] Semakin lama suatu Lembaga Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusi maka semakin banyak pula peluang dan hambatan yang dihadapi. Anak dengan berbagai macam kondisi akan datang ke sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar.[15]

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saiful Bahri (2022) dalam jurnal yang berjudul **“Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar”** menyatakan bahwa manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Barabai terdiri dari 8 ruang lingkup, yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik,

manajemen pembiayaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen budaya dan lingkungan sekolah, dan manajemen layanan khusus.[16]

Penelitian lain yang dilakukan oleh Atun Lestari, dkk(2022) dalam jurnal yang berjudul “**Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar**” menyatakan bahwa Dalam hal optimalisasi pengelolaan pendidikan inklusi, peran pemimpin sekolah sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam suatu lembaga sangat mempengaruhi arah dan tujuan yang ingin dicapai lembaga tersebut. Komunikasi yang efektif antara pimpinan sekolah, guru kelas, tutor khusus atau gur pembimbing khusus dan masyarakat akan berdampak positif terhadap tata kelola pendidikan inklusif. Dan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusif.[17]

Berdasarkan uraian di lapangan yang didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dikembangkan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni menitikberatkan pada sistem. Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi. adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[18] Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi dalam penelitian ini terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindaklanjut. Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi ini kami terapkan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan Sidoarjo. Adanya Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam mengimplementasikan dan meraih target pembelajaran Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan.

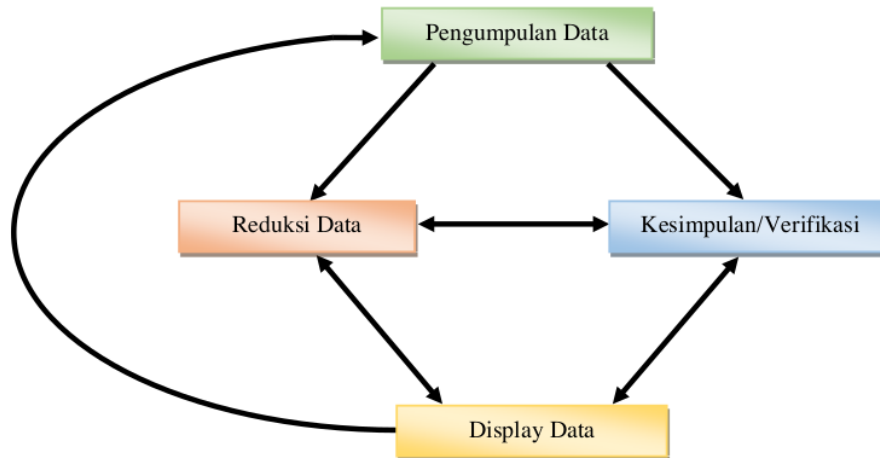
II. METODE

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh yang dapat disajikan dengan kata-kata secara terinci yang diperoleh dari sumber informan.[19] Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan.[19]

Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari: (1) Penggambaran obyek penelitian (describing object); agar obyek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, melustrasikan dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religious, dan sebagainya. (2) Mengungkapkan makna di balik fenomena (exploring meaning behind the phenomena); makna dibalik fenomena/fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam (dept interview) dan observasi berpartisipasi (participation observation). (3) Menjelaskan fenomena yang terjadi (explaining object); fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis.[20]

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *pertama*: Wawancara langsung kepada Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), dan Kepala UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo, peneliti melakukan kegiatan wawancara secara berkala kepada beberapa nasasumber yang sudah direncanakan. Hasil wawancara peneliti kepada narasumber dijadikan bahan untuk mengetahui keadaan secara riil implementasi Pendidikan Inku di SD Muhammadiyah 2 Tulangan.[21] *kedua*: observasi cara belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan implementasi sistem manajemen inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Pada tahap ini peneliti melihat langsung proses belajar mengajar di kelas kemudian melaksanakan pengambilan data melalui daftar uraian angket yang sudah disusun untuk dijadikan data.[22] *ketiga*: dokumentasi yang berupa laporan perkembangan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), berbagai catatan harian Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Lembar Kerja Siswa Anak Berkebutuhan Khusus(ABK). Peneliti akan berkoordinasi dengan Penanggungjawab Pendidikan Inklusi, Guru Pendamping Khusus(GPK), wali kelas dan orang tua terkait dokumentasi laporan yang diberikan kepada Anak Berkebutuhan khusus(ABK). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara menyeluruh tentang obyek penelitian, baik yang terkait dengan gambaran umum obyek penelitian maupun

implementasi sistem manajemen inklusi di sekolah dasar. Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan.[19] *Pertama* reduksi data yakni kegiatan memilih dan memilih data yang sesuai untuk dicari pola dan temanya. *Kedua*, Penyajian data, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk membuat penyajian deskriptif berdasar katagori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas. *Ketiga*, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data.

III. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan inklusif merupakan proses yang dinamis, agar pendidikan inklusif terus hidup, diperlukan adanya monitoring partisipatori yang berkesinambungan, melibatkan semua stakeholder dalam refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif adalah harus tanggap terhadap keberagaman secara fleksibel, senantiasa berubah, dan tidak dapat diprediksi. Jadi, pendidikan inklusif harus tetap hidup dan berjalan sesuai dengan amanah konstitusi.[7]

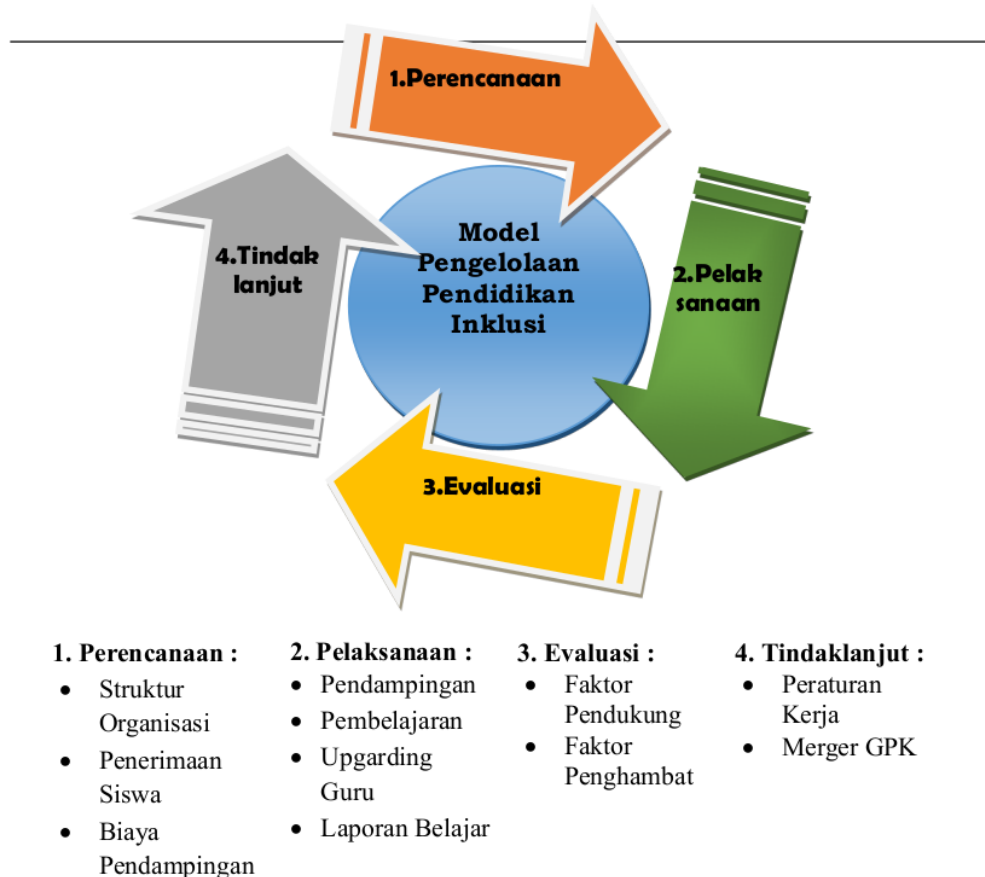
Implementasi layanan pendidikan inklusi masih dipahami hanya sebatas pada menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler sebagai upaya pemberian hak atas pendidikan bagi keseluruhan anak Indonesia, memudahkan akses layanan pendidikan, dan menghilangkan stigma diskriminasi.[12] Namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kecenderungan sikap lingkungan yang kurang proaktif dan ramah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik dengan kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa kedalam pembelajaran yang diselenggarakan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa pada umumnya.[23] Pendidikan inklusi bisa juga disebut dengan Pendidikan Holistik yang tidak memarginalkan sebagian anak karena memiliki hambatan disabilitas tertentu.

Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan pada sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah.[16]

Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi adalah suatu kerangka kerja atau tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi dilaksanakan dengan efektif di suatu institusi pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki

kebutuhan khusus, terlibat secara penuh dalam lingkungan pendidikan yang umum. Sistem manajemen ini melibatkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai komponen pendidikan inklusi, seperti kebijakan sekolah, alokasi sumber daya, pelatihan guru, kurikulum, dan partisipasi orang tua.[16]

Dalam konteks ini, Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman siswa, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sekolah.[10] Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan kebutuhan khusus, serta mempromosikan budaya inklusi di antara semua anggota komunitas pendidikan. Sistem ini juga mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi serta untuk terus meningkatkan praktik-praktik yang mendukung tujuan inklusi tersebut.



Gambar 2. Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi (SMPI)

Berdasarkan kerangka konsep tersebut menjelaskan bahwa Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut, adapun penjelasan detail sebagai berikut :

Tahap Pertama : Perencanaan(planning)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa perencanaan implementasi pendidikan inklusi diawali dengan penyusunan organisasi sekolah. Hal tersebut senada dengan pernyataan Pawero, "*Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan,*" yang mengatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang harus dibangun untuk menjadi pondasi utama dalam mencapai visi yang dibuat oleh sebuah Lembaga Pendidikan.[24] Kepala sekolah menunjuk seorang penanggungjawab Pendidikan inklusi untuk mengatur operasional implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Penanggungjawab Inklusi membawahi Guru Pendamping Khusus(GPK) untuk melaksanakan semua kebijakan dan program yang sudah disusun di awal Tahun Ajaran baru.

Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi membuka peluang adanya sistem identifikasi yang sangat variatif dalam menentukan apakah siswa tersebut tergolong disabilitas atau bukan. Upaya untuk melakukan asesmen pada anak-anak disabilitas hendaknya selalu dilakukan dari awal mereka mengikuti pembelajaran di sekolah, agar Guru Pendamping Khusus(GPK) dan guru kelas dapat memberikan penanganan dan pelayanan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru saja, melainkan dapat dibantu oleh beberapa pihak salah satunya adalah psikolog.[25]

Proses penerimaan peserta didik baru untuk pendidikan inklusi dibagi menjadi tiga tahap yaitu *observasi awal, observasi lanjutan dan penentuan kelas*. Pada tahap *observasi awal*, peserta didik mengikuti asesmen di poli Psikologi RSUD Kab. Sidoarjo. Sekolah memberikan rekomendasi kepada orang tua untuk datang bersama anaknya menemui psikolog RSUD KAB. Sidoarjo. Asesmen yang diberikan terdiri dari tes wawancara dan tulis kepada calon siswa. Pada tahap *observasi lanjutan*, Pada tahap ini calon siswa akan dapat diidentifikasi mereka tergolong ringan, sedang atau berat dan masuk pada tipe spesial yang mana. Setelah teridentifikasi maka psikolog dan terapis akan menentukan program apa yang sesuai dengan mereka dalam rangka menunjang pembelajaran selama di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Pada tahap *penentuan kelas*. Anak Berkebutuhan Khusus diklasifikasikan sesuai dengan hambatan yang dimilikinya dan diatur oleh wali kelas untuk menempati kelas yang sudah ditentukan.[26] Setelah menerima hasil asesmen, maka orang tua diberikan surat perjanjian untuk mengikuti prosedur penyelenggaraan Pendidikan inklusi, termasuk di dalamnya adalah pembayaran SPP reguler dan inklusif.[27]

Analisa peneliti terhadap tahap perencanaan ini menjadi modal yang sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan proses implementasi Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi di sekolah dasar. Tahap perencanaan yang terdiri dari pembentukan struktur organisasi, pola penerimaan siswa berkebutuhan khusus dan biaya pendampingan adalah tiga hal utama yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan sebagai rujukan mendasar implementasi Pendidikan inklusi yang sesuai dengan harapan dan target capaian yang dibuat.

Tahap Kedua : Pelaksanaan (*Actuating*)

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan sekolah inklusi yang diterapkan yaitu adanya pendampingan yang dilakukan secara *head to head* yaitu satu guru pendamping khusus mendampingi satu anak berkebutuhan khusus. Untuk mendukung pendidikan yang sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan penanganan yang berbeda-beda.[28] tahap kedua ini diawali dengan pola pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) oleh Guru Pendamping Khusus(GPK). Penentuan pendampingan berdasarkan hasil assesmen awal yang dikeluarkan oleh Poli Psikologi RSUD Kab. Sidoarjo. Penanggungjawab Inklusi SD Muhammadiyah 2 Tulangan melakukan pemetaan Guru pendamping Khusus(GPK) sesuai dengan hasil penilain saat rekrutmen guru untuk disesuaikan dengan proses pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Poli Psikologi RSUD Kab. Sidoarjo.

Secara periodik, tepatnya setiap 2 pekan akan dilakukan pergantian Guru Pendamping Khusus(GPK) terhadap Anak Berkebutuhan Khusus(ABK). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi rasa ketergantungan Anak Berkebutuhan khusus(ABK) kepada salah satu Guru Pendamping Khusus(GPK). Manfaat lain yang didapatkan dari pola pendampingan yang dilakukan secara bergantian akan memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) untuk bisa hidup di tengah-tengah Masyarakat yang heterogen di lingkungan rumah mereka masing-masing. Karena pada kenyataannya, ketika kelak Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) Kembali kepada lingkungan keluarga

dan masyarakat, mereka akan berinteraksi dengan berbagai macam orang dengan banyak sifat dan karakter. Berikut ini adalah data Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) dan Guru Pendamping Khusus(GPK) di SD Muhammadiyah 2 Tulangan :

No	Nama ABK	Kelas	Hambatan	Level	GPK
1	Axelle Arziki Otadan	1	Borderline	1	Bu Nikmah, bu Mazida
2	M. Fachry Farrukh A.	1	Autisme	4	Bu Aulia, bu Iin
3	M. Rafka Yusuf Fahreza	1	Autisme	4	Bu Devi, bu Rima
4	Tristan Al Jaras Putra I.	1	Disleksia	3	Bu Bila, bu Puput
5	M. Dirgham Haidar A.	1	Slow Learner	3	Bu Nungki, bu Aulia
6	Raditya Arkananta A.	1	Autisme	4	Bu Sinta, bu Fany
7	Achmad Iqbal A.	2	Autisme	4	Bu Tika, pak Niko
8	Yo Arsyad Algazello	2	Slow Learner	1	Bu Eka
9	M. Rafezya Azka	2	Intellectual De	4	Bu Ruli, bu Hanifah
10	Khayla Azzahra	2	Intelektual	3	Bu Aldyah, bu Yeni
11	Asiyah Humaira	2	Slow Learner	3	Bu Puput, bu Nikmah
12	M.Thoriq Mahardika	3	Pendengaran	3	Bu Yuni
13	Aqilla Ashyfa Poetri S.	3	Pendengaran	1	Bu Mazida
14	M Ruby Al Azfar Z	3	Autisme	2	Bu Eka dan Us Tika
15	Aldrian Dimas A	3	Autisme	1	Bu Hikmah
16	Airlangga Arganta Y	4	Slow Learner	1	Bu Hikmah, bu Firma
17	M. Rafael Bayu P	4	Disleksia	1	Bu Hikmah, bu Firma
18	Fathan Alghifari G	4	Penglihatan	4	Bu Yeni, bu Risa
19	Jalaludin Rumi	4	Disleksia	3	Tanpa pendampingan
20	Maeda Riska Nanda N.	4	Borderline	3	Bu Lina, bu Nungki
21	Wisnu Putra Aji	4	Intelektual	3	Bu Fany, bu Sinta
22	Felita Dwi Kanzun	4	Intelektual	1	Tanpa pendampingan
23	Emir Rafi Kamil P.S	5	Autisme	4	Bu Nanda
24	Abid Amalis Sholih	5	Intelektual	3	Bu.Niko, bu Lina
25	M. Rafa R.R	5	Intelektual	3	Bu Iin, bu Bila
26	Kanaya Almahyra R	5	Pendengaran	1	Bu Winda, bu Aldyah
27	Kautsar Ibrahim F	5	Disleksia	1	Bu Winda, Aldyah
28	Keisha Farah	5	Intelektual	3	Bu Hanifah, bu Ruli
29	Gifta Yesa	5	Pendengaran	3	Bu Rima, bu Devy
30	Prisya Jaswi K	6	Intelektual	2	Tanpa pendampingan
31	Hafizh Febiansyah	6	Intelektual	3	Bu Firma, bu Winda
32	Anaya Makkayla A	6	Intelektual	1	Tanpa pendampingan
33	Helga Putri Trivada	6	Disleksia	1	Tanpa pendampingan
34	Kaffi El Azzam Dinata	6	Disleksia	1	Tanpa pendampingan
35	Fadhil Ikhlas Santoso	6	Autisme	4	Us Amira
36	Hilmi Akbar	6	Disleksia	1	Tanpa pendampingan

Gambar 2. Tabel Daftar Anak Berkebutuhan Khusus SD Muhammadiyah 2 Tulangan

1 Setiap anak mempunyai kemampuan, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat dan motivasi yang berbeda-beda dalam memahami pengalaman belajarnya, karena itu, dalam pendidikan, baik di sekolah khusus maupun sekolah inklusi, setiap ABK mempunyai kebutuhan yang khusus di samping kebutuhan yang sama. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2020 menjelaskan akomodasi yang layak untuk menjamin terselenggaranya dan atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas atau kebutuhan khusus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan di semua jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun sekolah khusus. Kurikulum yang digunakan dalam Pendidikan inklusi adalah kurikulum pemerintah yang dimodifikasi, yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi anak-anak berkebutuhan khusus. Proses penyusunan materi, penyampaian dan evaluasi seperti layaknya anak-anak yang sesuai dengan perkembangannya.

Untuk mendukung pendidikan yang sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan penanganan yang berbeda-beda. ABK, pada umumnya, memerlukan sistem pembelajaran individual selain pembelajaran klasikal. Pembelajaran individual yang dimaksud adalah individualisasi pembelajarannya, atau pembelajaran yang diberikan secara khusus oleh guru kepada peserta didik meskipun mereka belajar bersama atau belajar bersama-sama dalam kelompok kelas atau pembelajaran klasikal. Layanan pembelajaran secara individual ini biasa kita sebut sebagai program pembelajaran yang diindividualisasikan atau program pembelajaran individual (PPI).[29] Program Pembelajaran Individual(PPI) menjamin akuntabilitas guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. PPI juga dapat melengkapi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kehidupan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, PPI memberikan struktur pembelajaran yang sistematis untuk membantu para pendidik memusatkan diri pada area pembelajaran yang penting sesuai kemampuannya.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan adalah Guru Pendamping Khusus(GPK) yang kompeten dan professional. Sekolah menyelenggarakan peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus(GPK) dengan cara mengadakan magang guru, pelatihan dan workshop.[31] Magang pertama Guru Pendamping Khusus(GPK) dilaksanakan selama tiga pekan di UPTD ABK Center Kab. Sidoarjo sesuai dengan hambatan siswa yang didampingi. Selama Guru Pendamping Khusus(GPK) magang di UPTD ABK Center Kab. Sidoarjo akan mendapatkan pelatihan baik secara teoritis maupun praktis. Magang kedua dilaksanakan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya yang merupakan sekolah induk sekolah dengan branding kreatif di Indonesia. Pada saat Guru Pendamping Khusus magang di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya akan mendapatkan ilmu tentang penanganan langsung Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) dengan berbagai macam hambatan, belajar tentang proses penyusunan kurikulum modifikasi dan manajemen pengelolaan kelas inklusi.

Selain itu sekolah juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala sesuai dengan program kerja yang disusun oleh penanggungjawab Inklusi dengan menghadirkan Kepala UPTD ABK Center dan atau Psikolog dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pelatihan dan workshop yang diprogramkan sekolah selain diperuntukkan bagi Guru Pendamping Khusus(GPK) juga ditujukan kepada seluruh stake holder sekolah antara lain : Staf Administrasi, security, penjaja di koperasi dan kantin sekolah, sopir antar jemput. Tujuan diadakannya pelatihan dan workshop Pendidikan Inklusi untuk seluruh stake holder antara lain : menyamakan persepsi tentang Pendidikan inklusi, memberikan pemahaman secara komprehensif, menumbuhkan kepedulian kepada Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) sehingga suasana belajar di semua tempat di sekolah menjadi kondusif terhindar dari perundungan dan pengucilan. Hasil wawancara peneliti bersama kepala sekolah didapatkan informasi bahwa pola pikir seluruh guru dan karyawan memandang semua anak adalah Bintang, dan ketika Bintang tersebut berada di SD Muhammadiyah 2 Tulangan akan menjadi semakin terang.

Jaminan kualitas yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua ialah dengan cara memberikan laporan perkembangan siswa. Hal tersebut penting dilakukan agar orang tua mengetahui secara cepat perkembangan anak mereka baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Evaluasi pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Bentuk evaluasi yang diberikan adalah evaluasi lisan dan tertulis agar mendapatkan hasil yang baik. Evaluasi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dapat terjadi di dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran berakhir.[32] Analisis pelaksanaan program Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan berjalan baik dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terbukti, ada beberapa sekolah lain yang melaksanakan studi tiru implementasi Pendidikan inklusi ke SD Muhammadiyah 2 Tulangan.

Tahap Ketiga : Evaluasi(Evaluation)

Implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan dilaksanakan dengan berpedoman pada analisis SWOT yaitu kondisi yang terkait dengan unsur kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) di lembaga[7]. Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan penanggungjawab inklusi SD Muhammadiyah 2 Tulangan didapatkan data bahwa beberapa faktor pendukung implementasi Pendidikan Inklusi antara lain : **Pertama**, dukungan kuat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD ABK Center. Kedua instansi tersebut merupakan pusat kendali Pendidikan baik secara langsung maupun tidak sangat berpotensi untuk menguatkan sekolah untuk mengimplementasikan Pendidikan inklusi. **Kedua**, tersedianya Guru Pendamping Khusus(GPK) yang proporsional dengan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus. Rasio yang seimbang antara Guru Pendamping Khusus(GPK) dan Anak Berkebutuhan Khusus(ABK) akan memudahkan proses pencapaian target yang sudah direncanakan oleh sekolah.

Ketiga, adanya kesadaran seluruh stake holder untuk menerima dan mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di sekolah. Hal ini penting karena sekolah ibarat sebuah lingkungan Masyarakat kecil yang nantinya anak berkebutuhan khusus banyak menghabiskan waktunya disana. Jika semua unsur bisa menerima keberadaan mereka maka akan menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus perasaan diterima oleh Masyarakat secara utuh tanpa adanya diskriminasi ataupun perundungan. **Keempat**, tersedianya Dana BOS Daerah untuk inklusi.[33] **Kelima**, dukungan orang tua. Ketika orang tua mendukung dan kooperatif dengan program yang dibuat maka target capaian yang ditentukan akan mudah diraih. Salah satu bentuk dukungan orang tua terhadap penyelenggaraan Pendidikan inklusi ialah dengan cara aktif mengikuti pertemuan bulanan sebagai momentum laporan diri anak kepada orang tua.

Selain faktor pendukung yang menguatkan ada juga faktor penghambat implementasi Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan antara lain : **Pertama**, Besaran Gaji Guru Pendamping Khusus yang belum seimbang dengan beban kerja menyebabkan mereka keluar masuk sehingga Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama sehingga capaian target pembelajaran menjadi terlambat. **Kedua**, lebih dari 50% latar Pendidikan Guru Pendamping Khusus yang tidak linier. Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah didapatkan data bahwa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus selalu ada setiap tahun akan tetapi calon guru yang akan direkrut sangat sedikit sekali yang berlatarbelakang Pendidikan Psikologi maupun Pendidikan Luar Biasa(PLB). **Ketiga**, tingkat kehadiran Guru Pendamping Khusus(GPK) yang seringkali absen menyebabkan pendampingan kurang maksimal. Konsep awal pendampingan bahwa satu Guru Pendamping Khusus(GPK) mendampingi satu Anak Berkebutuhan Khusus. **Keempat**, tingginya biaya pendampingan yang dikeluarkan oleh orang tua menyebabkan besarnya tunggakan pembayaran ke sekolah. Dana tunggakan yang belum dibayarkan oleh orang tua menyebabkan gaji yang akan diterima oleh Guru Pendamping Khusus(GPK) tidak bisa diterima oleh mereka.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari Kepala Sekolah dan Penanggungjawab dapat dianalisa bahwa faktor-faktor pendukung hendaknya senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan karena hal tersebut akan menyebabkan implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan semakin baik. Sebaliknya, sementara fakto-faktor penghambat yang ada di sekolah hendaknya harus segera dicarikan solusi sebagai bentuk perbaikan dan peningkatan capain target pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus(ABK).

Tahap Keempat : Tindak Lanjut (*Follow Up*)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan temuan penting hambatan implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan, diperlukan perbaikan antara lain:

1) Peraturan Kerja

Permasalahan mengenai belum optimalnya etos kerja guru menjadi bahan kajian yang menarik. Etos kerja guru yang belum optimal bahkan masih banyak yang tergolong rendah bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan akan berdampak pada terganggunya efektivitas, produktivitas yang akan menimbulkan tidak tercapainya suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, tidak optimalnya etos kerja guru dapat menjadi salah satu permasalahan besar yang harus dipecahkan dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam sekolah. Semua pihak harus saling bekerja sama mencari solusi pemecahan permasalahannya.[34] Peraturan kerja diperlukan

untuk mengatur sistem kerja Guru Pendamping Khusus, diantaranya memuat tentang besaran gaji yang disepakati bersama diawal, Tingkat absen kehadiran maksimal dalam sebulan dan linieritas latar belakang Pendidikan Guru Pendamping Khusus. Peraturan kerja ini juga memuat tentang kontrak kerja yang dibuat berkala yaitu tiga bulan, enam bulan dan satu tahun dengan monitoring dan evaluasi. Pada tiap tahapan waktu jika ditemukan kekurangan maka sekolah bisa memberikan teguran, peringatan dan memutus ikatan kerja sampai menemukan guru pengganti dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Hal ini penting dilakukan agar budaya mutu kerja yang ditunjukkan dengan etos kerja berkualitas bisa diterapkan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan.

2) Merger Pendamping

Dalam rangka menurunkan besaran biaya bulanan yang dibayarkan oleh orang tua, maka pola pendampingan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk anak yang mengalami hambatan ringan dan sedang dilakukan pendampingan satu Guru Pendamping Khusus. Orang tua bisa berbagi biaya dengan yang lainnya sehingga biaya bisa dirasakan lebih ringan. Untuk anak yang mengalami hambatan berat dilakukan pendampingan *head to head* yaitu satu anak berkebutuhan khusus didampingi oleh satu Guru Pendamping Khusus.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi yang diterapkan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan berjalan dengan baik. Salah satu wujud keberhasilan tersebut bisa dilihat dari keberhasilan SD Muhammadiyah 2 Tulangan dalam mengelola pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang sudah mendapatkan pendampingan secara optimal dari Guru pendamping khusus (GPK). Atas keberhasilan terapan Model Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan maka bisa dijadikan rujukan bagi sekolah yang hendak menyelenggarakan Pendidikan Inklusi.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membantu proses publikasi karya ilmiah serta pihak-pihak yang terkait.

REFERENSI

- [1] N. U. Ni'mah, A. N. Istirohmah, Hamidaturrohman, and A. Widiyono, "Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *J. Teach. Educ.*, vol. 3, pp. 345–353, 2022, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jote/article/view/4823>
- [2] D. Pristiawanti, B. Badariah, S. Hidayat, and R. S. Dewi, "Pengertian Pendidikan," *J. Pendidik. Dan Konseling*, vol. 4, no. 6, pp. 1707–1715, 2022.
- [3] F. Mansir, "Paradigma Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Dinamika Pada Sekolah Islam," *Tadrib*, vol. 7, no. 1, pp. 1–17, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6604/4094>
- [4] R. Tanjung, Y. Supriani, O. Arifudin, and U. Ulfah, "Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam," *JIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 339–348, 2022, doi: 10.54371/jip.v5i1.419.
- [5] M. Sahrudin, N. Djafri, A. S.-J. J. Of, and U. 2023, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif," *ejournal-fip-ung.ac.id*, vol. 4, no. 4, pp. 162–179, 2023, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/JJEM/article/view/2313>
- [6] N. Nabila, "Analisis Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar," *journal.ummat.ac.id*, vol. 5, no. 2, 2020, doi: 10.1007/s13398-014.

- [7] A. H. Utama, "Edudikara : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Model Desain Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Edudikara J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 20, pp. 140–151, 2021.
- [8] M. Faozanudin and L. S. Sulistian, "Tantangan Implementasi Pendidikan Dasar Inklusi Di Kabupaten Banyumas," *indopediajurnal.my.id*, vol. 1 nomor1, pp. 107–118, 2023, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/16>
- [9] M. M. Prayogo and N. I. Sholikhati, "Adaptasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Masa Pandemi Di Sekolah Inklusi," *Inklusi*, vol. 8, no. 1, p. 29, 2021, doi: 10.14421/ijds.080103.
- [10] I. N. T. Astawa, "Pendidikan Inklusi dalam Memajukan Pendidikan Nasional," *Guna Widya J. Pendidik. Hindu*, vol. Vol. 8, no. No. 1, p. hlm. 69, 2021.
- [11] R. N. Ramadhana, "Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus," *Progr. Stud. Pendidik. Bhs. Ingg. Univ. Lambung Mangkurat*, pp. 1–10, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/n8rxu>
- [12] R. Munajah, A. Marini, and M. S. Sumantri, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *jbasic.org*, vol. 5, no. 3, pp. 1183–1190, 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i3.886.
- [13] I. Yuwono and Mirnawati, "Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar," *repo-dosen.ulm.ac.id*, vol. 5, no. 4, pp. 2015–2020, 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i4.1108.
- [14] Y. lalak Muslimin, "Peran kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar," *socius.ppj.unp.ac.id*, vol. 7, no. 3, 2021, doi: 10.33394/jk.v7i3.3468.
- [15] R. Three, Rusdinal, and Hadiyanto, "Menuju Pendidikan Dasar Yang Lebih Baik Tantangan Penyelenggaraan Kebijakan Di kelas dan Solusi," *journal.unpas.ac.id*, vol. 08 nomor 0, pp. 994–1012, 2023, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/7554>
- [16] S. Bahri, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *Edukatif J. Ilmu Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 94–100, Nov. 2022, doi: 10.31004/edukatif.v4i1.1754.
- [17] J. Manajemen *et al.*, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *ejournal.yasin-alsys.org*, vol. 2, no. 6, p. 610, 2022, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/arzusin/article/view/703>
- [18] I. A.-E. J. P. Dasar and undefined 2022, "Problematika Pembelajaran Tematik Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi," *journal.unesa.ac.id*, Accessed: Nov. 16, 2023. [Online]. Available: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpd/article/view/11275>
- [19] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [20] Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *J. Sci. Commun.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.31506/jsc.v1i1.7764.
- [21] N. Aini and N. Nurdyansyah, "Application of Role Playing Methods in Indonesian Language Subjects in Class 2 of Elementary Schools," *Indones. J. Educ. Methods Dev.*, vol. 9, pp. 9–11, 2020, doi: 10.21070/ijemd.v9i1.545.
- [22] Nurdyansyah, B. Udin, and M. Alfian Rosid, "Pengembangan Media Alat Peraga Edukatif Interaktif (APEI) Laboratorium Bengkel Belajar Berbasis Custom By User," *J. Teknol. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 54–71, 2021, doi: 10.32832/educate.v6i1.4047.
- [23] R. S. Agustina and T. Rahaju, "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya," *Publika*, vol. 9, no. 3, pp. 109–124, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n3.p109-124.
- [24] A. M. D. Pawero, "Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan," *Dirasah*, vol. 4, no. 1, pp. 16–32, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- [25] D. I. Rahmawan, "Analisis Asesmen Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus," *Indones. Conf. Disabil. Stud. Incl. Educ.*, vol. 1, no. 1, pp. 47–62, 2020.
- [26] W. R. Al-Nur, "This research discusses the strategy of admitting new," *Strateg. Penerimaan Siswa Baru Pada Sekol. Inklusi Di Sch. Hum. Jatisampurna Bekasi*, vol. 9, no. 1, pp. 29–43, 2023.
- [27] S. K. Arum, H. Widyastono, and B. Sunardi, "Pendidikan Inklusi Sebagai Solusi Pendidikan

- Untuk Semua (Penerapan Pendidikan Inklusi di SDN Bromantakan 56 Surakarta),” *BEST J. (Biology Educ. Sains Technol.*, vol. 3, no. 1, pp. 120–126, 2020, doi: 10.30743/best.v3i1.2487.
- [28] N. Nurdyansyah, I. Istikomah, and I. R. I. Astutik, “Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusi Berbasis Aplikasi On-Line,” *Tadarus*, vol. 9, no. 2, pp. 138–149, 2020, doi: 10.30651/td.v9i2.7525.
- [29] L. P. I. Budyawati, “Pengembangan Program Pembelajaran Individual (PPI) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Jember,” *Progr. Stud. PGRA*, vol. 6, no. 2, pp. 89–101, 2020.
- [30] L. I. Badiah, M. N. Jauhari, and S. Sambira, “Peningkatan Keterampilan Guru Paud Dalam Menyusun Program Pembelajaran Individual Anak Berkebutuhan Khusus Di PAUD Permata Bunda,” *SPEED J. J. Spec. Educ.*, vol. 3, no. 2, pp. 95–100, 2020, doi: 10.31537/speed.v3i2.287.
- [31] N. Laili, Z. Nurfahmawati, and K. Wachidah, “PKM Peningkatan Kompetensi Guru dalam Proses Identifikasi Siswa Berkebutuhan Khusus di SLB Aisyiyah Porong,” *J. Pengabd. Pada Masy.*, vol. 7, no. 4, pp. 920–929, 2022, doi: 10.30653/002.202274.173.
- [32] M. Melania *et al.*, “Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar,” *J. Pendidik. Inklusi Citra Bakti*, vol. 1, pp. 68–74, 2023.
- [33] S. Sania, “Kebijakan Permendiknas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi,” *PRODU Prokurasi Edukasi J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 29–37, 2019, doi: 10.15548/p-prokurasi.v1i1.3325.
- [34] H. N. Hidayah and B. Santoso, “Motivasi dan disiplin kerja sebagai determinan etos kerja guru,” *J. Pendidik. Manaj. Perkantoran*, vol. 4, no. 2, p. 141, 2020, doi: 10.17509/jpm.v4i2.18008.

novan umsida

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



kurikulum.kemdikbud.go.id

Internet Source

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5%

Exclude bibliography On